

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Sampang

Bagian : **Sekretariat**

Dasar Hukum Kelembagaan: : 1.Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020

2.Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	TUPOKSI	JENIS PELAYANAN
1.	Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan	a. Pengelolaan surat masuk dinas b. Pengelolaan surat keluar dinas
2.	Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian	Pelayanan Pengurusan Cuti Pegawai Pelayanan Pengurusan Pengajuan SK Pensiun Pelayanan Pengurusan Kartu Pegawai Pelayanan Pengurusan Kartu Istri / Suami Pelayanan Pengurusan Kartu Taspen Pelayanan Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai
3.	Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai	Pelayanan Pembayaran Gaji Pegawai

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Bidang : **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**

Dasar Hukum Kelembagaan: : 1.Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020

2.Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	TUPOKSI	JENIS PELAYANAN
1.	Melaksanakan fasilitasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.	Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Pengangkatan Anak.
2.	Melaksanakan kegiatan kajian program kegiatan pengembangan pelayanan sosial.	Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3	Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial	Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial
4.	Melaksanakan penyelenggaraan dan jaminan sosial bagi eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomis	Pelayanan Rumah Singgah.

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Bidang / Seksi: Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial / Penanganan Fakir Miskin

Dasar Hukum Kelembagaan : 1.Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020
2.Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	TUPOKSI	JENIS PELAYANAN
1.	Melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin.	Pelayanan Permohonan Ijin Pengumpulan Sumbangan (Uang/Barang)
2.	Melaksanakan pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran/Surat Tanda Pendaftaran Ulang Lintas Kabupaten Bagi Yayasan/LKS/LKSA.

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Bidang : Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dasar Hukum Kelembagaan: 1.Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020
2.Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	TUPOKSI	JENIS PELAYANAN
1.	Melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan social	Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah, Bantuan Sosial Pada Perorangan, Kelompok Masyarakat dan Lembaga Sosial (individu

		terlantar, korban bencana, konflik sosial dan pekerja migran). Pelayanan Pemberian Surat Keterangan PBI-JKN (BPJS-Kesehatan).
--	--	--

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Bidang : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dasar Hukum Kelembagaan: 1. Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020

2. Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	TUPOKSI	JENIS PELAYANAN
1.	Melaksanakan fasilitasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan Konseling Keluarga

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD

: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Dasar Hukum Kelembagaan : 1.Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020

2.Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	BIDANG/ JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM
SEKRETARIAT		
	Pelayanan Internal a. Pengelolaan Surat Masuk Dinas	<ul style="list-style-type: none">• UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public• Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan• Kepmendagri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata kearsipan dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten• Perbup Sampang No. 35 Tahun 2010 tentang Tata naskah dinas dilingkungan Pemkab.Sampang• Keputusan Bupati Sampang No. 188.45 / 485/ KEP/ 434.013/ 2015 tentang Penetapan kode wilayah tata kearsipan dilingkungan Pemkab.Sampang• Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/ 486/ KEP/ 434.013/ 2015 tentang Pengkoordinasian Perangkat Daerah Kab.Sampang dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.
	b. Pengelolaan Surat Keluar Dinas	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public• Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan• Kepmendagri No. 78 Tahun 2012 tentang Tata kearsipan dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Kabupaten• Perbup Sampang No. 35 Tahun 2010 tentang Tata naskah dinas dilingkungan Pemkab.Sampang• Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/ 485/ KEP/ 434.013/ 2015 tentang Penetapan kode wilayah tata kearsipan dilingkungan Pemkab.Sampang▪ Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/ 486/ KEP/ 434.013/2015 tentang Pengkoordinasian Perangkat Daerah Kab.Sampang dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.

	c. Pelayanan Pengurusan Cuti Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ▪ PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan
	d. Pelayanan Pengurusan Pengajuan SK Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan
	e. Pelayanan Pengurusan Kartu Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan
	f. Pelayanan Pengurusan Kartu Istri / Suami	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan
	g. Pelayanan Pengurusan Kartu Taspen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai ▪ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ▪ PP No. 25 Tahun 1981 tentang Peserta Asuransi Sosial PNS pada PT. Taspen (Persero) ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan

	<p>h. Pelayanan Pengurusan Kenaikan Pangkat Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan ▪ PP No. 35 Tahun 1968 tentang Pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan pekerjaannya secara luar biasa
	<p>i. Pelayanan Pembayaran Gaji Pegawai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ▪ Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan ▪ Peraturan Dirjen No. PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
	<p>Pelayanan Eksternal</p> <p>a. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU. No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara ▪ Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman penanganan pengaduan masyarakat ▪ Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah. ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan.
	<p>b. Pelayanan Permohonan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan informasi Publik ▪ UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik ▪ UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ▪ PP RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14/2008 ▪ Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan Pergub Jatim No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemprop.Jatim ▪ Pergub Jatim No. 65 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Pergub Jatim No. 55 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemprop.Jatim ▪ Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 tahun 2010 tentang Standart layanan informasi publik ▪ Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik ▪ Perda Prop. Jatim No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan publik di Prop. Jatim ▪ Perbub Sampang No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemkab.Sampang ▪ SK Bupati Sampang No. 188.45/60/KEP/434.013/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemkab. Sampang
--	--	---

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Dasar Hukum Kelembagaan: 1.Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020
2.Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	BIDANG/ JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL		
	a. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Ijin Pengangkatan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak • Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota • Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan • Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

		<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati Sampang No. 188.45 / 486 / KEP/434.013/2015 tentang Pengkoordinasian Perangkat Daerah Kab.Sampang dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan.
	b. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik Permensos RI N0. 16 Tahun 2013 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan
	c. Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal untuk perempuan dan anak korban kekerasan Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan.
	d. Pelayanan Rumah Singgah	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan Kepmenkes RI No. 922/MENKES. SK/2008 tentang Pedoman teknis pembagian urusan pemerintahan dibidang kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Bupati Sampang No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan program layanan rumah singgah di Kab. Sampang

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Dasar Hukum Kelembagaan: 1. Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020

2. Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	BIDANG/ JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM
BIDANG FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL		
	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran / Surat Tanda Pendaftaran Ulang Lintas Kabupaten Bagi Yayasan / LKS / LKSA	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik• UU No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga kesejahteraan sosial• PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal• PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial• Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan• Keputusan Kadinsos Prop.Jatim No. 460/333/102.006/2014 tentang SOP penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial
	a.ljin Pengumpulan sumbangan	<ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang• Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial• Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan• Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat• Peraturan Menteri Sosial No.15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Dasar Hukum Kelembagaan: 1. Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020
2. Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	BIDANG/ JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	a. Pelayanan Pemberian bantuan hibah, Bantuan Sosial pada perorangan, kelompok masyarakat yang ada di DTKS/Data Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public • PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah • Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah • Permenkeu No. 255/PMK.05/ 2010 tentang Tata cara pengesahan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh kementerian Negara/lembaga dalam bentuk uang • Permendagri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD • Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan
	b. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan PBI-JKN (BPJS-Kesehatan) dan jaminan kesehatan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial • UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik • UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin. • PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial. • PP RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan kesehatan • Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS. • Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan. • Permensos No. 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

		<ul style="list-style-type: none"> • Permensos No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Pengananan Fakir Miskin. • Kepmensos RI No. 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu • Kepmensos RI No. 147 / HUK / 2013 tentang Penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
--	--	--

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

SKPD : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang

Dasar Hukum Kelembagaan: 1. Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020
2. Peraturan Bupati Sampang No. 20 Tahun 2022

NO.	BIDANG/ JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	a. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public ▪ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ▪ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ▪ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak ▪ UU No. 23 Tahun 2002 jucto UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ▪ Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan. ▪ Perda Kabupaten Sampang No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ▪ Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Peraturan Bupati Sampang No. 11 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

	<p>b. Pelayanan Konseling Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public ▪ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ▪ UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ▪ UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak ▪ UU No. 23 Tahun 2002 jucto UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ▪ Permenpan RB No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat bagi instansi pemerintah ▪ Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan. ▪ Perda Kabupaten Sampang No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak ▪ Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ▪ Peraturan Bupati Sampang No. 11 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak ▪ Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelembagaan PUSPAGA
--	--	---